

## **BAB II**

### **HUBUNGAN RUSIA DAN SURIAH SERTA KEMUNCULAN ISIS**

*(islamiq state in Iraq and syam)*

Dalam BAB II ini, penulis akan menjelaskan tentang kebijakan politik luar Negeri Rusia dan Politik Luar Negri Rusia berdasarkan era, serta Gambaran secara Umum Negara Rusia dan Suriah serta Hubungan Bilateral nya, dan Menjelaskan tentang Pemerintahan di bawah Rezim Bashar Al-Assad di Suriah, serta Problematika Politik dan Keamanan Rusia di Suriah pasca kemunculan ISIS (*Islamis state in Iraq and syam*), dan bentuk Dukungan dari Pemerintah Rusia Terhadap Bashar Al-assad dalam melawan ISIS. Penjelasan pertama akan dimulai dari Hubungan Bilateral kedua Negara ini.

#### **A. Kebijakan dalam perpolitikan Rusia dan Politik Luar Negri Rusia**

##### **1. Pembuat Kebijakan Dalam Perpolitikan Rusia**

Setelah runtuhnya Uni Soviet Rusia menjadi sebuah Negara yang berbentuk Federasi yang dipimpin oleh seorang Presiden. Pada tanggal 12 Desember 1993 Dideklarasikannya Rusia sebagai Negara Hukum yang berbentuk Federasi dengan sistem Pemerintahan presidensil dengan sistem Pemerintahan pemisahaan kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan yudikatif yang masing-masing berdiri sendiri. (Waller, 20105, p. 27)

##### **Eksekutif**

Dari sistem yang dianut oleh Rusia yakni semi parlemen maka terdapat 2 kepala pada pemerintahannya yakni, presiden sebagai kepala pemerintah, serta 24

perdana menteri dan kabinetnya yang bertanggung jawab atas parlemen. Terdapat 6 peran presiden dalam sistem politik di Rusia.

a. Wali Negara

Presiden merupakan perwakilan negara, menjamin konstitusi Federasi Rusia, menjaga independensi dan integritas negara, sebagai ketua Dewan Keamanan. Selain itu presiden juga sebagai kepala angkatan bersenjata sehingga ia berhak menyetujui atau tidak doktrin militer di Rusia.

b. Kepala Eksekutif

Kekuasaan tertinggi Federasi Rusia berada ditangan presiden, sehingga presiden sebagai ketua eksekutif. Dalam konstitusi presiden bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, sementara kekuasaan eksekutif berada ditangan pemerintah. Pada triparti, fungsi dan tugas presiden dan pemerintah Federasi Rusia berada dalam kekuasaan eksekutif. tetapi presiden tidak hanya menjadi sumber utama kebijakan. ia juga menunjuk pemerintah, namun pemerintah tidak memiliki otoritas karena komposisi tidak ditentukan oleh parlemen yang terpilih.

c. Peran Legislatif

Presiden juga memainkan peran dalam perundang-undangan, karena presiden diberikan kekuasaan luas dalam legislatif. Presiden berhak menyerahkan rancangan Undang-Undang kepada parlemen. Sebagai negara konstitusi Presiden Rusia juga mengeluarkan keputusan dan tidak memerlukan konfirmasi dari majelis, meskipun mereka tidak dapat bertentangan dengan konstitusi federal. Selain itu presiden juga memiliki kekuasaan konstitusional untuk mereferendum. Itu semua dirancang oleh Yeltsin dan diikuti oleh Putin dalam hal tugas seorang presiden dalam Federasi Rusia, dan semua peraturan tersebut digunakan pada tahun 2003

ketika konstitusi ini telah disetujui melalui referendum.

d. Perlindungan

Presiden memiliki kekuasaan dalam membuat ataupun melakukan perjanjian politik, hal ini telah tercantum dalam konstitusi.

e. Mewakilan Rusia

Presiden mengemban tugas sebagai perwakilan Rusia di kancah Internasional, Rusia menjadi pemain utama dalam dunia internasional, hal ini terlihat jelas bagaimana pengaruh dan keikutsertaan Rusia dalam organisasi-organisasi internasional seperti keanggotaan Rusia dalam klub negara industri. membuat G7, G8. Dan Rusia menjadi salah satu negara yang memiliki kapasitas nuklir, karena Rusia dikenal dengan produksi peralatan perang dan militer.

f. Titik Fokus Politik

Presiden adalah titik fokus dari politik Federasi Rusia, Federasi Rusia menjadikan presiden sebagai titik fokus politik. Sejarah dan keadaan yang sama sudah menjelaskan peran presiden sebagai fokus kehidupan perpolitikan Federasi Rusia.

**Legislatif**

Kekuasaan Legislatif Federasi Rusia dipegang oleh Parlemen Federasi Rusia yang terdiri dari Majelis Tinggi (The Federation Council) dan Duma Negara atau Majelis Rendah (The State Duma). Parlemen dalam Federasi Rusia bertugas memperkenalkan dan mempertimbangkan perundang-undangan, sekaligus sebagai dewan pemeriksa terhadap perundangan yang diusulkan.

Dewan Federasi memiliki tanggung jawab diantaranya memilih seorang Jaksa Agung untuk pengadilan tinggi Rusia. Menyetujui dalam pengesahan undang-undang yang dirancang oleh presiden. serta mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan provinsi dan lain-lainnya.

Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Federasi antara lain :

1. Persetujuan terhadap keputusan Presiden Federasi Rusia pada pengenalan darurat Militer;
2. Persetujuan Keputusan Presiden Federasi Rusia pada pengenalan keadaan darurat;
3. Menentukan Kemungkinan menggunakan Angkatan bersenjata Federasi Rusia diluar Wilayah Federasi Rusia
4. Menyatakan Pemilihan Presiden Federasi Rusia;
5. Dakwaan terhadap Presiden Federasi Rusia;
6. Menyetujui calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Federasi Rusia yang di ajukan Presiden;

Yang kedua adalah Duma Negara, Secara formal Duma Negara memiliki kekuasaan yang cukup besar, dimana Duma Negara mempunyai wewenang untuk mengesahkan Undang-undang, menyetujui anggaran belanja dan pendapatan Negara, melakukan konfirmasi terhadap dipilihnya seorang menteri oleh Presiden.

### **Yudikatif**

Kekuasaan Yudikatif juga disebut sebagai badan peradilan Federasi Rusia. Pada kekuasaan Yudikatif terdapat 3 institusi yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Arbitrasi. Para hakim dalam Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Arbitrasi diangkat oleh Dewan Federasi,

dengan calon yang diajukan oleh presiden sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang. Tugas lain yang dimiliki oleh kekuasaan Yudikatif yakni dapat memecahkan perselisihan hukum yang terdapat dalam konstitusi. Mahkamah Agung merupakan mahkamah tertinggi dalam pengadilan perdata, yang mengatur tentang segala bentuk kriminal, hak-hak sipil, serta memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan-pengadilan yang ada dibawahnya. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia memiliki 19 orang anggota hakim agung. Mahkamah Konstitusi dapat menyetujui konstitusi atas jaminan Hak Asasi Manusia, terhapusnya dominasi partai komunis dan pluralisme politik, dan Mahkamah Arbitrasi berperan terhadap masalah ekonomi, bisnis.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, secara garis besar Politik Luar Negeri Rusia dibentuk oleh situasi yang terjadi di dalam Negerinya. Ada empat poin yang menjadi penghubung antara Politik dalam negeri dengan Politik Luar negeri Rusia.

Pertama, proses pembuatan kebijakan Luar Negeri Rusia didominasi oleh kelompok kepentingan seperti loyalis pemerintah dan pebisnis. Walaupun mayoritas penduduk Rusia tidak memiliki kekuatan untuk menentukan politik Luar Negeri Rusia, namun tetap disisi lain pemerintah Rusia mempertimbangkan implikasi yang akan terjadi dari kebijakan yang di ambil. Dalam Sistem Politik tertutup, sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh para pembuat keputusan itu sendiri, para pengambil keputusan di Uni Soviet berupaya membangun suatu Iklim Opini yang mendukung kebijakan-kebijakan Luar Negeri mereka.

Kedua, Politik Luar Negeri Rusia sangat dipengaruhi oleh lembaga Eksekutif Negara. Dalam perpolitikan Luar Negerinya, Eksekutif Rusia mampu

mengatur kebijakan yang diambil agar tidak berseberangan dengan kepentingan. Hal ini juga tertera dalam konstitusi Negara tahun 1993 yang menyebutkan bahwa Presiden sebagai pembuat kebijakan Negara, memiliki otoritas yang menentukan pedoman dasar politik Luar Negeri Rusia..

Ketiga, Otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan Luar Negeri ada di tangan Eksekutif atau presiden, namun pengimplementasian kebijakan masih harus diputuskan oleh parlemen. Disinilah Eksekutif menggunakan isu-isu luar Negeri sebagai alat untuk mengumpulkan dukungan dari parlemen dalam pembuatan kebijakan di dalam Negeri. Ini artinya isu-isu Internasional yang akan memberikan dampak secara langsung pada Rusia akan dijadikan dalih atau alasan oleh Presiden dalam proses pembuatan kebijakan domestik.

Keempat, adanya prioritas Pemerintah terhadap sektor Ekonomi, dalam poin yang keempat ini dimaksudkan bahwa Rusia memerlukan kerjasama yang mampu memacu perekonomiannya. Dari Poin-poin yang telah disebutkan, secara garis besar karakter dasar lah yang menentukan arah politik luar Negeri Rusia, namun pihak eksekutif sebagai lembaga tertinggi memiliki kekuasaan tersendiri sesuai dengan situasi Global yang terjadi, kepentingan yang akan dicapai dan karakter dari Pemerintah yang sedang berkuasa itu sendiri.

## **2. Politik Luar Negeri Rusia berdasarkan Era**

Kebijakan luar negeri Rusia sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan Uni Soviet, kebijakan luar negeri Rusia saat ini juga mengadaptasi kebijakan luar negeri Uni Soviet. terdapat 4 legasi dari faktor keluarnya kebijakan luar negeri Uni Soviet :

Pertama, Uni Soviet mewariskan sebuah persepsi atau cara pandang bahwa Rusia adalah *Great Power*, persepsi sebagai *Great Power* menjadi cara pandang para elit pemerintahan Rusia memandang sistem internasional.

Kedua, terdapat gagasan bahwa ukuran dari suatu negara merupakan komponen utama kepentingan nasional dan adanya konsiderasi geopolitik meliputi geografi, populasi dan sumber daya manusia. Tolak ukur atas ancaman dan kekuatan dalam perspektif Uni Soviet adalah aspek geopolitik. Geografi menjadi bahan pertimbangan bagi para elit Uni Soviet dalam bertindak melalui kebijakan luar negerinya. Secara geografi, Uni Soviet menjadi pusat sistem internasional dengan posisinya berada di tengah dunia. Oleh sebab itu, Uni Soviet memiliki pasukan militer yang kuat untuk membantu proses implementasi kebijakan luar negeri yang berbasis geopolitik.

Ketiga, penggunaan konsep *equilibrium distribution of power* melalui *counter balancing*. Uni Soviet menganut paham eksistensialis yaitu suatu paham yang beranggapan bahwa eksistensi kita ditentukan oleh keberadaan aktor lain. Adanya pandangan bahwa sistem internasional tidak dapat dikelola oleh 1 kekuatan agar terjadi keseimbangan distribusi kekuatan. Sehingga counterbalance yang dilakukan oleh Uni Soviet menjadi dasar dalam Uni Soviet melakukan Hubungan Internasional. Di dalam sejarah eksistensinya, Uni Soviet selalu menjadi kekuatan besar yang menyeimbangkan situasi saat itu dengan negara besar lainnya.

Keempat, Uni Soviet selalu berusaha untuk menghindari perang terbuka karena dianggap merugikan. Uni Soviet lebih menyukai perang secara diam-diam, di mana kekuatan intelejen memiliki peran penting. Jika sampai melakukan perang terbuka, itu berarti hanya dilakukan Uni Soviet di negara-negara sekitar.

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, banyaknya terjadi perubahan Dalam bidang politik, perubahan terjadi pada sistem pemerintahan. Pada saat Michael Gorbachev memerintah Uni Soviet menganut ideologi komunis hingga terpilihnya Borits Nikolayevich Yeltsin dalam pemilihan langsung berakhirlah masa komunisme di Rusia dan berganti menjadi sitem pemerintahan Republik. Kebijakan-kebijakan yang terjadi di Rusia selalu berganti seiring dengan bergantinya presiden di Rusia. Berikut politik luar negeri Rusia berdasarkan presiden yang memerintah:

**a. Masa Borits Nikolayevich Yeltsin (1991-1999)**

Borits merupakan Presiden pertama di Rusia yang menggantikan pendahulunya, Pada masa pemerintahan Yeltsin perubahan sangat jelas terjadi dalam bidang politik, karena sebelum Yeltsin memerintah Rusia menganut ideologi komunisme garis keras yang dipimpin Michael Gorbachev dan Yeltsin berhasil mengukudeta kaum komunis tersebut hingga berganti menjadi demokrasi.

Era Yeltsin merupakan masa dramatis dalam sejarah Rusia. Periode yang ditandakan dengan perubahan Politik Revolusioner, Demokrasi bersama dengan adanya masalah besar dalam politik dan social. Satu di antaranya adalah Korupsi yang merajalelah dan terbuka. Sejak diangkatnya Yeltsin menjadi Presiden Rusia Gencar menerapkan program Swastanisasi dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan besar Rusia yang merupakan sumber kekayaan Ekonomi Negara dan menghasilkan Devisa bagi kas Negara. Dalam menjalankan politik luar negeri nya Yeltsin banyak bekerja sama dengan negara- negara barat sebagai usaha agara menyeimbangkan posisinya dengan negara barat. Selain itu, Rusia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia Timur yang semakin pesat



kemajuannya.

Dalam kebijakan Luar Negri, dengan bergantinya Perdana Menteri Victor Chernomyrdin menjadi Perdana Menteri baru yaitu Yefgeny Primakov menandakan adanya perubahan menuju pendekatan baru dengan menekankan pada peran Rusia sebagai kekuatan besar yang berdaulat dalam sebuah anarkis, membangun system Internasional dari dalam sendiri dimana kekuatan Negara lebih berharga daripada Institusi dan norma-norma Internasional. Dengan adanya perubahan ini para Diplomat Rusia dan para pengambil keputusan telah menekankan kembali bahwa Rusia harus memiliki Politik Luar Negri yang independen, tidak hanya berkiblat ke barat. Pada masa akhir jabatannya, Yelstin sadar bahwa orientasi Politik Luar Negri ala Barat tidak sesuai dengan Alam Rusia karena sudah terlalu jauh menyesatkan dan menenggelamkan Rusia.

#### **b. Masa Dimitry Medvedev (2008-2012)**

Sebelum Medvedev Presiden kedua adalah Vladimir Putin, medvedev merupakan presiden Rusia yang ketiga yang terpilih pada pemilihan umum pada tahun 2008. Pada saat dirinya terpilih sebagai presiden Rusia pada 7 Mei 2008, ia mulai merancang kebijakan-kebijakan politik luar negeri Rusia.

Dalam bidang Keamanan Medvedev melakukan tindakan yang orientasi nya berjangka panjang untuk membangun keamanan Rusia, Medvedev menggunakan Strategi prioritas dengan menentukan tingkat keamanan Nasional dan tingkat kestabilan jangka panjang pembangunan Negara. (Sargih, 2008)

Kebijakan Dalam bidang ekonomi Medvedev mempromosikan Bisnis Rusia kepada Negara-Negara internasional. Kebijakan ini diarahkan pada Ekonomi Global agar Ekonomi Rusia masuk kedalam Ekonomi Liberal. Rusia

sebagai negara yang memiliki Sumber Daya yang Potensial memiliki kebijakan Pragmatis dimana dalam penggunaannya telah memperluas kemungkinan bagi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Dunia Internasional.

### **c. Masa Vladimir Putin (2000-2008/2012-sekarang**

Vladimir Putin lahir di Leningrad pada 7 Oktober 1952, pada tahun 2000 Vladimir Putin pernah menjabat sebagai Presiden Rusia yang ke-dua, pada tahun 2012 lalu Vladimir terpilih untuk yang ketiga kalinya menjadi Presiden Rusia setelah Dimitry Medvedev. Vladimir Putin Lulusan Ilmu Hukum Universitas Leningrad memulai kariernya sebagai Walikota Leningrad pada tahun 1994, kemudian di tahun 1996 ia berangkat ke Moskow untuk berkarier disana menjadi Wali Kota. Pada tahun 2000 Vladimir diangkat menjadi Presiden dan berakhir di tahun 2008, dan pada tahun 2012 Vladimir diangkat kembali menjadi Presiden Rusia untuk yang kedua kalinya.

Awal dirinya menjabat sebagai presiden Rusia ia mengeluarkan dekrit yang menjadikan 89 wilayah menjadi distrik dengan tujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan pusat. Elemen utama dari Pemerintahan Putin adalah “order”, yakni ketertiban Hukum dan penegakan aturan main. Menegakkan Disiplin bagi aparat pemerintah, agar terhindar dari praktek-praktek kotor seperti korupsi manipulasi dan lain sebagainya. Dalam bidang Ekonomi dimana pengembangan ekonomi yang liberal secara moderat dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Rusia sendiri. Ini aturan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan swasta, hal ini untuk mengantisipasi atau menghindari perampokan kekayaan Negara oleh kaum oligarki.

Dasar Politik yang didasari Putin adalah “*demokrasi berdaulat*” yang mana demokrasi Rusia harus didasari sendiri oleh Rusia bukan dari pihak lain, Sejak dipilihnya kembali menjadi Presiden 2012 lalu, Putin memerintahkan agar angkatan bersenjata Rusia segera dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan modern, agar pada tahun 2020 mendatang sekitar 70 persen dari kekuatan militer Rusia sudah terdiri dari sistem persenjataan baru. Selain itu Putin pun memerintahkan agar membentuk beberapa lembaga eksekutif baru di tingkat federal yang akan bertanggung jawab terhadap pemesanan dan implementasi pesanan sektor pertahanan. Jumlah personel kontrak di angkatan bersenjata Rusia rencananya juga akan ditambah sebanyak 50.000 personel setiap tahun. (Asrudin, 2014).

Diangkatnya Putin sebagai Presiden Rusia pada 2012 lalu membawa warna baru bagi Rusia baik dalam perekonomian, politik, maupun hubungan Rusia dengan negara lain. Seperti istilah sentralisme demokrasi yang digunakan Putin dalam sistem yang dijalankan Putin selama pemerintahannya, berdampak positif pada perkembangan perekonomian Rusia, terbukti saat Rusia berhasil melunasi hutang-hutang negara, juga berhasil meningkatkan kontrol Rusia untuk mengelola sumber daya alam miliknya sendiri, ini merupakan salah satu bentuk sistem sentralisme yg diberlakukan oleh Putin. Rusia dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin, dengan tangan besinya Putin bisa menjadikan Rusia sebagai negara yang mampu bersaing dalam dunia internasional. Rusia menyadari bahwa menjadi negara yang memiliki *bergining position* dalam kancah internasional harus memiliki kekuatan militer yang kuat, oleh karena itu Rusia memperkuat angkatan senjatanya. Nuklir juga termasuk salah satu kekuatan perekonomian dan tumpuan strategi keamanan Rusia selain produksi senjata ataupun peralatan

perang, terhitung terdapat 31 reaktor yang dimiliki. Dari sekian banyak negara, Rusia adalah salah satu negara yang giat mengembangkan nuklir diberbagai negara seperti India, Tiongkok, Iran, Venezuela, dan masih banyak lagi negara-negara yang terikat kerjasama energy dengan Rusia.

Semakin banyak negara yang terikat kerjasama membuat Rusia semakin mengepakkaan sayap dalam politik luar negerinya. Tidak hanya energi nuklir, Rusia juga mengembangkan produksi peralatan perang untuk mengembangkan perekonomiannya, hingga sekarang Rusia menjadi produsen senjata terbesar. Seiring perkembangan waktu, sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, dan bertransformasi menjadi Rusia sampai dengan saat ini, politik luar negeri Rusia lebih banyak dicirikan dengan kepentingan militer-strategis dan ekonomi.

Realisasi kebijakan politik luar negeri Putin lebih banyak berlandaskan pada nilai kebesaran (great power) yang pernah disandang Rusia masa lalu (kekaisaran dan Uni Soviet). Retorika kejayaan masa lalu dan harapan untuk dapat mengembalikan kejayaan tersebut pada masa sekarang dijadikan Putin sebagai salah satu tujuan kebijakan strategis Rusia, yaitu menciptakan sistem dunia multipolar. Putin sejak tahun 2012 memang lebih mengutamakan keaktifan Rusia dalam aktivitas internasional. Anti-barat yang ditunjukkan Putin juga tetap ditegakkan seperti menolak adanya sistem unipolar, karena sistem tersebut akan menjadikan dunia hanya memiliki satu kekuatan besar saja yaitu Amerika Serikat. Langkah Putin menjadikan Rusia sebagai salah satu “kekuatan baru” dalam sistem dunia multipolar dimulai dengan reformasi internal, terutama bidang ekonomi. Putin menaruh perhatian besar pada reformasi bidang ekonomi dengan tujuan menjadikan Rusia sebagai magnet ekonomi bagi negara-negara bekas Uni Soviet.

## **B. Hubungan Bilateral Rusia Suriah**

Setelah runtuhnya Uni Soviet negara yang menggantikannya adalah Rusia. Rusia muncul pada saat bangsa skandinavia memasuki kota Novgorod pada tahun 826 M dan memerintah disana hingga pada tahun 822 M mengembangkan wilayahnya ke daerah Kiev, kota Slavia. Pada tahun 989 wilayah Rusia semakin meluas hingga Kauskasus dan Laut Hitam, dan pada tahun 1922 pemerintahan berada ditangan Joseph Stalin yang diktator dan mewujudkan Uni Soviet, dan berakhir pada tanggal 25 Desember 1991 pada saat presiden Mikhail Gorbachev mundur dari pemerintahan dan terbentuknya negara Rusia.

Federasi Rusia atau Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan luas wilayah 17.075.400 km<sup>2</sup>. Secara geografis Rusia terletak di antara Asia dan Eropa, walaupun daratannya lebih banyak terletak di Asia, mayoritas populasi penduduk Rusia tinggal di kawasan Eropa barat, Rusia adalah ahli waris utama Uni Soviet, negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya. Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara adidaya, meskipun negara Rusia merupakan negara besar saat ini tetapi statusnya masih jauh dibandingkan dengan Uni Soviet dahulu.

Selanjutnya negara Suriah, Suriah merupakan salah satu pusat peradaban paling tua di muka bumi, Pada tahun 1975 ada Penggalan yang dilakukan oleh para arkeolog di Kota Ebla bagian utara Suriah menunjukkan, sebuah kerajaan Semit sempat berdiri dan menyebar dari Laut Merah ke Turki dan Mesopotamia pada 2500-2400 SM. Etnis Suriah diketahui merupakan etnis Semit dengan 90 persen terdiri atas warga Muslim, 74 persen Sunni dan 16 persen terdiri atas

kelompok Muslim lainnya termasuk Alawi, Syiah dan Druze. Sementara 10 persen adalah warga Kristen.

Suriah merupakan Negara yang memiliki letak geografis di kawasan Timur Tengah yang berbatasan dengan Turki di sebelah utara, Palestina dan Yordania di sebelah selatan, Lebanon dan Laut Tengah di barat dan Irak di bagian timur. Jumlah wilayah Suriah 185.180 km persegi dengan sebagian wilayah merupakan gurun. Ibukota Negara Suriah ini adalah Damaskus dengan sistem pemerintahan Republik. Dengan wilayahnya yang merupakan penghubung antara Asia dan Afrika ini menjadikan wilayah Suriah sebagai wilayah yang strategis dalam segala aspek. Negara-negara besar mulai melirik Suriah sebagai kawasan yang menarik dan beberapa di antara Negara-negara besar ini mulai mencoba menjalin hubungan dengan Suriah.

Dalam dunia Internasional, negara pada hakekatnya perlu melakukan hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam negara itu sendiri karena negara tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa ada hubungan kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara satu dengan negara lainnya dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral. Dengan adanya bentuk kerjasama suatu negara akan mempererat hubungan baik antar negara.

pada tahun 1946 Hubungan Suriah dan Rusia mulai dirintis, Uni Soviet merupakan Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah. Hubungan diplomatik mereka semakin baik, pada tahun 1972 Hafeez Al-assad menandatangani perjanjian fakta pertahanan keamanan dengan Uni Soviet. pada tanggal 08 oktober 1980 Suriah menjalin hubungannya dengan di tandatanganinya perjanjian Pakta pertahanan lanjutan dengan Sekretaris Jendral

Uni Soviet Leonid Brezhnev. Fakta pertahanan di perpanjang 20 tahun, Dan pada tahun 1987 Pemerintahan Michael Gorbachev berjanji akan terus melakukan kerjasama dengan Suriah dengan memberikan bantuan Ekonomi dan Militer hingga sampai pada Pemerintahan Bashar Al-Assad, Hubungan Kerjasama yang Secara History sudah terbentuk ini lah yang membuat Hubungan antar kedua Negara ini sangat dekat. (Timur Tengah, 2012).

Bagi Uni Soviet, Suriah merupakan aliansi utama mereka untuk memperkuat eksistensinya di Timur Tengah. Posisi Suriah yang sangat strategis bagi eksistensi Uni soviet di timur tengah mendorong kerja sama antar kedua Negara tersebut, letak Suriah yang langsung berbatasan dengan laut mediterania yang membuat Suriah menjadi Negara yang strategis, banyaknya kerjasama yang memperat hubungan mereka. Pada tahun 1970 Uni Soviet memberikan bantuan perlengkapan militer yang banyak kepada Suriah, dan pada tahun 1971 Uni Soviet membangun pangkalan angkatan laut militernya di Suriah.

Pada tahun 1991 Runtuhnya kekuasaan Uni Soviet, banyaknya aliansi dari Uni Soviet yang pindah ke Amerika Serikat. Pasaca Runtuhnya Uni Soviet menjadikan hubungan antara Suriah dan Uni Soviet menjadi renggang. Hal ini di manfaatkan Amerika Serikat dengan mencoba menjalin hubungan dengan Suriah. Setelah kematian presiden Suriah Hafez Al-Assad di tahun 2000. Kekuasaan Suriah digantikan oleh anaknya Bassar Al-Assad. Dengan bergantinya kekuasaan di Suriah menjadikan hubungan mereka sedikit menjauh. setelah runtuhnya Uni Soviet Banyak Negara-negara yang memilih bergabung dengan Amerika. Amerika Serikat mulai mengincar Suriah sebagai Negara yang bekas aliansi Uni Soviet. Namun Suriah tetap bergabung dengan Uni Soviet. Karena banyak hubungan yang terjalin antara Suriah dan Rusia pada masa presiden Hafedz Al

Assad membuat Suriah tetap konsisten terhadap Uni Soviet. (Jaringnews.com, 2013)

Ditandai nya dengan Adanya krisis ekonomi yang melanda Rusia di tahun 2005 Suriah ikut membantu dengan memberikan tawaran pembelian senjata dengan nilai 2 miliar dollar AS untuk pembelian sistem pertahanan udara baru. Bassar Al-Assad juga menawarkan kepada Rusia untuk menanamkan perusahaan Rusia di Suriah. Dan pada tanggal 10 Mei 2010 untuk yang pertamakalinya kunjungan presiden Rusia yaitu Medvedev ke Damaskus. Dalam kunjungan itu adanya kesepakatan baru antara Rusia dan Suriah yaitu Rusia akan membantu Suriah dalam Infrastruktur Gas dan Minyak serta mengembangkan pusat energi nuklir.

Pada tahun 2008 adanya kunjungan delegasi angkatan laut Suriah mengunjungi Rusia dan menyepakati kerjasama Militer, kerja sama antar kedua Negara ini juga di tandai dengan kunjungan yang dilakukan oleh presiden Dimitri medvedev ke Suriah, ini merupakan kunjungan yang pertama kalinya oleh presiden Rusia ke Suriah. Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 10-11 Mei 2010 ini menciptakan kesepakatan bahwa Rusia akan membantu Suriah dalam membangun infrastruktur Gas dan Minyak serta pengembangan pusat Energi Nuklir.

Walaupun Suriah bukan anggota blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, namun Suriah merupakan rezim Ba'athis yang berorientasi Sosialis yang dimana hal ini identic dengan blok timur, dimana adanya kesamaan paham. Secara ideologis, Rezim Bashar al-assad yang berkuasa di Suriah lebih berorientasi Sosialis ketimbang sebagian rezim yang berkuasa di Arab, selain itu rezim Bashar al-assad juga pas diidentifikasi blok timur ketimbang non-blok. Suriah juga



dipandang sebagai asset Geostrategis penting bagi Rusia. Karena satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di laut tengah hanya ada di Suriah di pelabuhan Tartus.

Hubungan baik antara Rusia dan Suriah semakin dapat dilihat Pasca terjadinya konflik internal di Suriah, Rusia memberikan banyak bantuan dalam mengatasi konflik yang ada di Suriah, Sejak 2011 lalu Rusia memberikan dukungannya kepada Pemerintahan Bashar Al-assad dalam mengatasi konflik di Suriah, dari mengeluarkan hak Veto atas resolusi Konflik yang ingin dikeluarkan PBB (*Persikatan Bangsa Bangsa*), dengan Rusia mengeluarkan hak veto nya maka resolusi ini tidak bisa dijalankan, Rusia juga mendukung penuh Pemerintahan Bashar Al-Assad dengan membantu mengirmkan persenjataan ke Suriah dalam melawan para pihak oposisi padatanggal 17 agustus 2011. Hubungan Rusia dan Suriah semakin erat dari hari ke hari, terlihat dari upaya Rusia yang tak gentar dalam membantu Pemerintahan Bashar dalam melawan para pemberontak di negaranya, agar tercipta kestabilan politik dan ekonomi di Suriah. (www.bbc.com, 2015)

### **C. Dinamika problematika Politik dan Keamanan Rusia di Suriah**

#### **Pasca kemunculan ISIS**

Sebelum membahas kehadiran ISIS di Suriah, Penulis akan menggambarkan secara umum tentang pemerintahan di Suriah yang di pimpin oleh Bashar Al-assad.

## **1. Suriah di bawah Pemerintahan Bashar Al-Assad**

Bashar Al-Assad lahir di Damaskus pada tanggal 11 september 1965, Bashar adalah Putra dari mantan Presiden Hafeez Al-Assad yang berkuasa hampir 30 tahun dari tahun 1971 sampai 2000 karna meninggal, setelah kepergian hafeez al-assad yang menggantikan di kursi kepresidenan ialah Bashar Al-assad, meski Suriah mengklaim sebagai Negara Republik tapi Hafeez Al-assad telah menyiapkan Putranya sebagai penggantinya, pada awalnya Hafeez menyiapkan Basil Al-assad sebagai penggantinya, namun karena adanya kecelakaan yang merenggut nyawa Basil Al-assad pada tahun 1994. (Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, 2012, p. 53)

Pertanda Bashar akan ditunjuk sebagai pengganti Basil mulai dapat dilihat sejak ia dilibatkan dalam kepengurusan Partai Ba'ath yang berkuasa dan diberi kekuasaan bnyak, bahkan Bashar diangkat sebagai Komandan Divisi Kendaraan Lapis Baja angkatan Darat Suriah. Usaha untuk memperkenalkan Bashar AL-assad kepada jajaran Partai Ba'ath, Militer dan rakyat Suriah terus dilakukan, jabatan penting yang diberikan kepada Bashar adalah menengani semua masalah Lebanon, pada tahun 1998 yang sebelumnya dipegang oleh Wakil presiden Abd al-halim khaddam. Meskipun Wakil Presiden tidak suka dengan keputusan itu tetapi tidak bisa berbuat lain selain menyerahkan jabatannya kepada Bashar. Dengan jabatan itu Bashar mulai membangun basis kekuatannya dalam pemerintahan maupun Militer, ini merupakan jalannya menuju puncak kekuasaan di Surah. (Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, 2012).

Pada tanggal 24 juni 2000, partai Ba'ath mengadakan Kongres Nasional kesembilan, yang merupakan Kongres pertama dalam waktu 15 tahun terakhir. Agenda kongres hanya satu, memilih seorang Sekretaris Jenderal Partai Ba'ath,

yang baru. Dan kandidatnya juga hanya satu : Bashar Al-assad.seluruh peserta Kongres. Seperti sudah diduga karena memang sudah direncanakan sepakat memilih Bashar al-assad sebagai sekretaris jenderal yang baru. (Kuncahyono, Musim Semi Suriah, 2012, p. 59).

Pada tanggal 10 Juli 2000, terpilihnya Bashar AL-assad menjadi Presiden kedua di Suriah.tampilnya Bashar Al-Assad sebagai pemimpin baru suriah yang semula diragukan kemampuannya terlebih karena kurang memiliki pengalaman politik, namun dengan dukungan jajaran Militer, Partai ba'ath dan kelompok alawite, Bashar al-assad mulai memimpin Suriah, memiliki latar belakang pendidikan barat, menjadikan modal usahanya untuk membangun dan membawa Suriah untuk menatap dan mengarungi masa depan, setelah diangkat nya menjadi presiden Bashar melancarkan serangkaian pembaharuan yang sesuai dengan tuntutan Zaman. Bashar melancarkan kampanye anti korupsi memodernisasi aparatur Negara, menggunakan Teknologi Modern dalam manajemen, melakukan Reformasi Ekonomi dan melakukan Hubungan diplomatik yang baik dalam rencana Politik Luar Negrinya.

Sekalipun Bashar al-assad sudah melakukan Reformasi Ekonomi sebaik mungkin, tetapi tetap saja yang memperoleh keuntungan dari kebijakan Bashar al-assad adalah mereka yang memiliki hubungan atau ikatan dengan keluarga rezim, atau mereka yang menjalankan bisnis dengan keluarga atau yang memiliki koneksi Politik dengan partai yang berkuasa. Banyak yang berpendapat yang kaya bertambah kaya dan yang miskin tetap miskin, tekadnya untuk memberantas korupsi hanya sampai pada pernyataan.

Proyek Bashar al-assad adalah “memodernisasi authoritarianisme” di Suriah. Ambisi ini sejalan dengan derakan-gerakan serupa di seluruh Negri,

kekuasaan otoritarian digunakan oleh Bashar al-Assad untuk mendorong liberalisasi ekonomi dan privatisasi/swastanisasi, mengalihkan aset public kepada kapitalis kroni yang memiliki “jaringan hak-hak istimewa”. Pada saat yang sama, dilakukan liberalisasi politik terbatas dan manipulasi pemilu untuk memfasilitasi terus berlangsungnya pemerintahan otoritarian. Dengan kata lain, semua gerakan modernisasi adalah semu, hal itu terbukti ketika pada akhirnya pecah pergolakan melawan rezim Bashar al-Assad. (Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, 2012, p. 228)

Pada akhirnya orang melihat dan berpendapat bahwa masa 18 bulan hidup di London belumlah cukup untuk membentuk dirinya berbeda dengan ayahnya. Bashar yang lahir dan besar di Damaskus, di Suriah. Ia tetaplah anaknya dari Hafez al-Assad penguasa Suriah tiga dasawarsa. Ia lahir dan tumbuh dewasa di saat perang dingin, saat Negerinya terlibat perang dengan Israel, saat Negerinya terlibat dalam urusan Lebanon dan mengendalikan Lebanon. Semua itu sangat mewarnai Hidupnya. Cara pandangnya, yang menurut David W Lesch membentuk prinsip-prinsipnya bukan studinya di London. (Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, 2012, p. 75).

## **2. Konflik Suriah dan Kemunculan ISIS**

Pada penghujung 2010, kawasan di Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi rakyat. Suatu revolusi yang bertujuan untuk merubah sistem pemerintahan dan menumbangkan penguasa, Revolusi ini dimulai dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan sekarang yang sedang berlangsung di Suriah.

Konflik di Suriah terjadi sejak Januari 2011, dimana rakyatnya menuntut mundur Presiden Bashar al-Assad. Bermula sejak terjadinya banyak konflik di beberapa Negara di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah arab spring, Maret 2011 Suriah yang mendapatkan giliran, Musim Semi yang tiba lebih awal di Tunisia, Mesir dan Libya, merambat ke Suriah juga. Apa yang terjadi di Negara-Negara tersebut memberikan Inspirasi, menguak kesadaran Rakyat Suriah bahwa Negerinya perlu berubah, bahwa Pemerintahan harus memenuhi hak Rakyatnya. (Kuncahyono, Musim Semi Suriah, 2012, p. 8)

Pada tahun 2011 ini Rakyat Suriah melakukan revolusi (perlawanan) terhadap rezim Asaad. Aksi protes ini menuntut penghentian Rezim Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai diktator, Aksi-aksi demo-pun mulai bermunculan di suriah, rakyat suriah mulai menyuarakan tuntutan mereka untuk menghentikan rezim Bashar Al-Assad. Pada 6 Maret 2011, Pada 25 Maret 2011, sekitar 100.000 orang berpawai di kota Daraa, dan 20 orang demonstran terbunuh pada pawai itu. Bentrokan antara demonstran dan tentara Suriah pun semakin sering terjadi. Pemerintah Suriah pun tak segan untuk menggunakan senjata api bahkan tank untuk merepresi rakyat dan membungkam gerakan protes tersebut. Aksi represi ini dulu merupakan cara yang efektif untuk membungkam rakyat Suriah. Namun kini telah berubah hal ini hanya memicu terjadinya demonstrasi-demonstrasi lain yang lebih dahsyat. (R. Abouzeid, 2012).

Aksi protes ini menuntut penghentian Rezim Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai diktator, Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Bashar Al-Assad, namun itu dianggap tidak cukup dan terlambat. Memang tidak sepenuhnya benar bahwa rezim Bashar dan ayahnya tidak melakukan Perubahan.

Perubahan ada, hanya saja perubahan itu hanya dirasakan oleh kalangan atas saja, atau kalangan yang dekat dengan kekuasaan.

Keluarga Bashar al-Assad mendominasi kekuatan Ekonomi dan politik, karena tidak membuka peluang bagi hidupnya partai selain partai Ba'ath yang berkuasa. Kehidupan rakyat Suriah ada ditangan pemimpin Rezim yang berkuasa. Dari ayahnya, Hafez al-Assad, Bashar tidak hanya mewarisi monopoli, hegemoni ekonomi dan politik, tetapi juga aparat keamanan. Aparat keamanan yang menjadi syaraf-syaraf kehidupan Rezim dikuasai oleh Assad, memimpin Divisi keempat yang bertanggung jawab untuk melindungi rezim, dan menebarkan kematian dan kehancuran di seluruh Suriah yang menentang Rezim Bashar. Misalnya di Deraa, Rastam, Homs dan Tel al-kalakh. Kematian dan kehancuran disebarakan ke seluruh Suriah dengan cara-cara yang brutal. Cabang-cabang aparat keamanan yang lain juga dikuasai oleh anggota dan krooni-kroni keluarga Bashar. Hingga kini bila dihitung sejak Hafez al-Assad berkuasa, November 1970, maka keluarga Assad sudah berkuasa selama lebih dari 40 tahun. (Kuncahyono, Musim Semi Suriah, 2012, p. 96)

Bashar tidak bisa menerima dan mendengar aspirasi dari Rakyat, Bashar al-Assad mempertahankan kekuasaannya dengan kekerasan, dimana pada tanggal 6 maret 2011 terjadinya penyiksaan terhadap anak-anak sekolah oleh aparat keamanan di Deraa karena mengkritik pemerintahan melalui coretan atau graffiti di dinding sekolah mereka yang bertuliskan "*As-shaab yoreed Eskaat el Nizaam*" yang artinya "*Rakyat ingin menumbangkan Rezim*" dan menginginkan Revolusi di Suriah, dari sinilah api Revolusi itu bermula berkobar, Rakyat tidak bisa lagi mentoleransi tindak kekerasan, penyiksaan dan lain sebagainya. Mereka sudah cukup lama hidup dibawah tekanan, terbelenggu dan tidak memiliki kebebasan.

Apalagi ditambah dengan kesulitan Ekonomi yang mendera. Pada hari yang sama 15 maret 2011 Demonstrasi juga pecah di kota pantai Baniyas, Rezim yang berkuasa melarang para perempuan Guru memakai *niqob* , pakaian perempuan muslim, jilbab model Suriah. (Kuncahyono, Musim Semi di Suriah, 2012)

Pada tanggal 6 april 2011 Pemerintah berusaha mengambil hati dari kalangan Sunni, yang merupakan kelompok mayoritas di Suriah, Pemerintah mencabut larangan para Guru perempuan menggunakan Niqob, dan para Guru yang sudah dipecat akan dipulihkan kembali jabatannya. Dan pada tanggal 14 april Pemerintah mengumumkan pembebasan ratusan tahanan Politik yang ditangkap dan ditahan sejak perlawanan muncul. sudah diterapkannya sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi rakyat, dan juga pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963.

Namun persoalannya ketika undang-undang darurat dicabut, muncul aturan baru yang sama mengekangnya seperti memberikan imunitas kepada pihak aparat keamanan untuk melakukan penentuan dan menghukum mati anggota persaudaraan Muslim, selain itu ada undang-undang yang melindungi aparat keamanan Nasional dalam memerangi mereka yang di anggap kelompok Teroris, dan selain itu penerapan multipartai hanya sebatas perkataan semata, dimana ada Sembilan partai yang diperbolehkan Hidup. Namun mereka bergabung dengan partai Ba'ath membentuk apa yang disebut Fron Progresif Nasional. Dengan adanya Partai-partai ini seolah-olah Suriah memberi tempat bagi system multipartai. Tetapi, sebenarnya tidak mengubah esensi bahwa Suriah adalah Negara dengan Satu partai : partai Ba'ath. Partai dan Militer bersimbiose menjadi kekuatan utama Suriah terutama kekuatan keluarga Assad. (Kuncahyono, Musim Semi Suriah, 2012, p. 227)

Ternyata semua kebebasan yang telah diberikan tidak cukup membuat rezim Bashar berbeda dengan ayahnya, Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Bashar Al-Assad, namun itu dianggap tidak cukup dan sudah terlambat. Kini rakyat Suriah hanya menginginkan penggulingan rezim Bashar Al-Assad dan pengangkatan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis. (Kuncahyono, Musim Semi Suriah, 2012, p. 110)

Ketika gerakan perlawanan di Suriah semakin menjadi dan muncul dimana-mana, baik di kota kecil maupun kota besar. Bahkan menyentuh dua kota utama Negeri itu Damaskus dan Aleppo. Semakin hari semakin banyak yang memperkeruh Konflik yang ada di Suriah, di antaranya adalah kaum Sunni yang merupakan kelompok mayoritas ingin membalas Dendam terhadap sekte Alawite Syiah yang selama Rezim Bashar berkuasa menjadi kelompok yang paling diuntungkan, menguasai baik sektor Militer, Politik dan Ekonomi. Pada akhirnya partai Ba'ath, Militer, Politik maupun Ekonomi tumbuh bersama dan menjadi pilar kekuasaan Keluarga Assad yang beragam syiah. Sementara kelompok Sunni lebih banyak tersingkirkan. Hak-hak mereka tidak terpenuhi sebagai Rakyat dan sebagai kaum muslim yang menjalankan ajarannya dibatasi bahkan sempat tidak diperbolehkan bagi mereka menggunakan hijab dan niqab. Pada dasarnya Kaum syiah sangat mengkhawatirkan Nasionalisme Arab Sunni, karena itu di Suriah mereka memutuskan untuk melumpuhkan Nasionalisme Arab Sunni. Inilah antara lain Benih perpecahan dan perseteruan serta persaingan antara syiah dan muslim Sunni.

Muncullah pemberontakan ISIS di Suriah dan menginginkan penurunan Bashar Al-Assad dari Pemerintahannya, Kemunculan ISIS di Suriah ini memperburuk suasana konflik yang terjadi di Suriah, banyaknya rakyat Sunni



Suriah yang pada akhirnya bergabung dalam ISIS untuk menggulingkan Pemerintahan Bashar dari kursi Presidennya. Dimana rakyat Suriah mayoritas beragama islam sunni, kehadiran ISIS membuat semangat jihad rakyat yang beragama sunni semakin besar untuk menggulingkan pemerintahan yang diktator dan tidak sesuai dengan paham mereka. Sesungguhnya semua itu berakar dari presepsi “kafir-non kafir” yang membela manusia menjadi sekawanan “jihadi” yang se-“akidah” dengan mereka sehingga haram darahnya dan seluruh manusia lainnya yang tidak seakidah dengan mereka maka halal darahnya. Gerakan jihad umumnya bertolak dari sejenis “tauhid” yang secara ironis menganjurkan takfir, yakni paham tauhid ini untuk mengkafirkan siapapun yang diluar paham ini. Maka untuk menegakkan daulah islamiyah dan segala macam tantangan yang tidak sepaham dengan mereka tentu jelas kafir dihadapan mereka dan darah nya halal untuk mereka tumpahkan. (Muhammad, 2014).

ISIS merupakan organisasi fundamental Islam yang dideklrasikan pada tahun 2014. Organisasi ini sudah ada sejak lama namun baru dideklarasikan pada tahun 2014, cikal bakal ISIS ini bermula dari almarhum Abu Musab al-Zarqawi, warga Yordania yang mendirikan Tawhid wa al-Jihad di tahun 2002. Setahun setelah invasi Irak yang dipimpin Amerika Serikat, Zarqawi menyatakan dukungan kepada Osama Bin Laden dan membentuk Al Qaeda di Iraq (AQI).

Tahun 2006, AQI mendirikan organisasi Negara Islam di Irak (ISI) yang kemudian melemah. Setelah menjadi pemimpin di tahun 2010, Baghdadi membangun kembali ISI. Mereka bergabung dalam pemberontakan menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad. April 2013, Baghdadi mengumumkan penggabungan pasukannya di Irak dan Suriah dan diciptakannya Negara Islam di

Irak dan Levant (ISIS). Juni 2014, ISIS menguasai kota Mosul, Falujjah, Anbar, Ramadi semua dibawah kendali mereka. (Muhammad, 2014)

Pada akhir bulan Juni, tepatnya pada tanggal 29 juni 2014 ISIS mendeklarasikan organisasi ini, dalam sebuah rekaman suara kelompok ini menyatakan bahwa komandan mereka Al-Baghdadi akan menjadi pemimpin bagi umat muslim sedunia. Al-Baghdadi sendiri sempat melontarkan ajakan atau seruan kepada seluruh muslim dunia agar bergabung bersamanya dan turut terlibat mendirikan kekhalifahan Islam. (Muhammad, 2014).

Organisasi ini memiliki empat faham ideologi sekaligus, masing-masing yaitu Islamism Sunni (Sunni Islam), Salafist Jihadism (Jihad Salafiah). Worldwide Caliphate (Kekhalifahan Islam Internasional) dan Anti Shiaism (Anti Mazab Syiah). Dari sisi kepemimpinannya, ISIS tidak lepas dari peranan tiga tokoh pemimpin, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Oemar al- Shisani dan Abu Mohammad al-Adnani. (SyriaIraqTheIslamicStateMilitantGroup, 2014).

ISIS, yang kini telah dirubung 15.000-an milisi lintas-Negara dan seorang komandan yang memiliki gaya kepemimpinan khas Al-Qaeda telah berkembang menjadi ancaman terbesar di suriah, bahkan dunia. Tak bisa dipungkiri sejak dipimpinn Al-Baghdadi kekuatan ISIS makin besar dan terorganisir. Hal ini terbukti dengan ditaklukkannya sejumlah wilayah di irak dan suriah. Suriah yang masih mengidap demam musim semi arab dan dipimpin Bashar AL-Assad yang beragama syiah. Ini merupakan target utama milisi Sunni, inilah pemantik semangat balas dendam Al-Baghdadi paling utama sebagai pemeluk sunni, syiah harus dibabat habis hingga ke akarnya.

Kelompok ini berkeinginan mendirikan sebuah "khilafah", sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau

syariah. ISIS menguasai wilayah-wilayah di Irak dan Suriah, di wilayah-wilayah ini ISIS menerapkan hukum Islam yang sangat ketat. Misalnya Potong tangan bagi para pencuri, rajam bagi pezina, sebagaimana yang dialami Faddah Ahmad di Kota Raqqa dan Shamsah Abdullah di Kota Tabqa pemenggalan kepala adalah bentuk penerapan hukum mereka. (Muhammad, 2014).

Simpatisan ISIS bermunculan diberbagai negara, Hal ini berkat kepriawaian mereka bermain propaganda di media sosial. CIA memperkirakan, pada tahun 2015 kekuatan ISIS berjumlah 31 ribu orang, lembaga lain bahkan memprediksi lebih banyak lagi. CNN menuliskan, di tahun 2014, ISIS menguasai wilayah seluas lebih dari 88 ribu km persegi di Irak dan Suriah, dari pesisir Mediterania hingga selatan Baghdad, menghapuskan batas dua negara.

Pada Februari 2015 lalu, Ketua Komisi Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Michael T. McCaul, mengatakan :

“bahwa kekuasaan ISIS meluas, hingga setara luas wilayah Belgia. ISIS juga mengatur kehidupan 11 juta orang di dalamnya, menarik miliaran dolar dari pajak, penjualan minyak ilegal dan pemerasan”

Salah satu pertempuran melawan ISIS yang terbesar terjadi selama berbulan-bulan di Kobani, Suriah, menewaskan 1.600 orang, pada November 2014. ISIS terusir dan pasukan Kurdi menguasai 90 persen kota tersebut. Dan pada bulan November juga, ISIS menguasai kota Maheen di provinsi Homs. Kota ini sangat strategis karena terletak hanya 20 kilometer dari jalan utama yang menghubungkan ibu kota Suriah, Damaskus, dengan kota-kota di utara, termasuk Homs. Dengan menguasai kota Palmyra dan Al-Qaryatayn, ISIS memiliki basis yang kuat di utara dan timur Suriah. ISIS juga menguasai wilayah dari Palmyra

hingga perbatasan Suriah-Irak dan garis depan Suriah-Yordania.  
(cnnindonesia.com, 2015)

Ibu kota ISIS adalah Raqqa di Suriah, namun militan ini juga menjadikan Mosul di Irak sebagai kota utama mereka. ISIS membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa provinsi di luar Irak dan Suriah atau yang disebut "wilayah." ISIS bukanlah kelompok militan sembarangan. Sebuah bocoran dokumen yang dikutip The Guardian menunjukkan bahwa ISIS serius membangun sebuah negara. Dalam dokumen berjudul Prinsip Pemerintahan Negara Islam yang ditulis Juni 2014 itu diatur soal pembentukan beberapa kementerian, seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan, komunikasi dan lapangan pekerjaan.  
(cnnindonesia.com, 2015)

Ditulis oleh seorang warga Mesir bernama Abu Abdullah sesaat setelah Abu Bakar al-Baghdadi mengumumkan kekhalifahan, dokumen itu juga memuat soal sistem pendidikan, pengaturan sumber daya alam, industri, hubungan luar negeri, hubungan masyarakat dan kamp pelatihan militer. ISIS mengatur wilayah secara ketat. Ada prosedur yang harus dipenuhi agar sebuah daerah bisa menjadi wilayah ISIS. Di antaranya, seperti yang diberitakan International Business Times, wilayah harus memiliki fungsi strategis bagi ISIS, yaitu menerapkan syariat Islam dengan ketat. (cnnindonesia.com, 2015). Dimana Konflik yang terjadi di Suriah seperti pertempuran kekuatan, yang mana salah satu pihak atau pihak lain harus memenanginya dan yang mana, salah satu akan menentukan nasib Negara.

Dalam perkembangannya untuk mewujudkan Negara islam dalam tahun 2014 ISIS telah mendirikan sekolah, mengurus peradilan, memberikan pelayanan bus atau pelayanan publik lainnya, dan mengurus segala yang berkenaan dengan

tata kelola pemerintahan termasuk dalam ekonomi yang berbasis syariah dan para perempuan tidak cukup hanya memakai jilbab namun harus memakai cadar, semua peraturan dikelola oleh pemimpin yang berbasis Islam dan sesuai dengan paham yang mereka anut. (Muhammad, 2014).

Namun dalam perkembangannya pula untuk menegakkan syariat Islam. upaya ISIS dalam mewujudkan negara Islam ternyata dijalankan dengan tindakan-tindakan represif, termasuk intimidasi, penyerangan, pembakaran pemukiman, peledakan bom dan lain-lainnya. Kelompok Islam pegaris keras ini secara brutal berupaya menyingkirkan kelompok masyarakat dan elit yang non-Sunni, termasuk agama lain. Hingga pada awal tahun 2016, dilaporkan 470 ribu orang, termasuk perempuan dan anak-anak menjadi korban tindakan kelompok ISIS tersebut, 400 ribu warga Suriah tewas akibat kekerasan. Sedangkan 70 ribu lainnya meninggal akibat faktor kesehatan, obat-obatan, air bersih, atau tidak memiliki tempat tinggal. (International.Sindonews, 2016).

Melalui rekaman suara yang dirilis oleh Muassasah al-Furqan yang berafiliasi dengan ISIS, pada November 2016, al-Baghdadi dalam pesannya yang diberi judul “Inilah Yang Dijanjikan Allah dan RasulNya” menyatakan bahwa “dunia kufur” mengerahkan segenap kemampuannya untuk “memadamkan cahaya Allah” yang, menurutnya, termanifestasi dalam ISIS.

Dalam pesan yang disertai kutipan beberapa ayat suci al-Quran itu dia menyebutkan bahwa serangan militer terhadap ISIS dari umat-umat kafir karena melihat api Islam berkobar kembali, melihat beberapa tempat yang sudah berbasis Islam dan menjadi salah satu menara yang berdiri di bawah naungan kekhalifahan. Dia juga mengingatkan penduduk dan para kombatan ISIS,

terutama brigade pasukan *Inghimasi* (berani mati/bom bunuh diri) berjuang membendung serangan dan bahkan memulai serangan balik.

Al-Baghdadi mengatakan :

“Perang ini adalah perang kalian, ubahlah malam orang-orang kafir menjadi siang, dan tumpahkan darah mereka agar menjadi aliran-aliran sungai,”  
(liputanislam.com, 2016)

Menurut data yang dilansir CNN dan Pew Research Center, sekitar 11.000 dari 25 Negara di dunia telah datang ke Suriah untuk berperang melawan rezim Presiden Suriah, Bashar Al- Assad. Lantas bergabung ke dalam tubuh ISIS, Berdasarkan Data di atas penyumbang anggota ISIS terbesar adalah Tunisia dengan jumlah 3.000 orang, dalam hal ini Anggota dari Rusia pada tahun 2014 berjumlah 800 orang. Jumlah anggota ini belum termasuk yang dari Suriah dan Irak itu sendiri. (Muhammad, 2014)

Dengan peluasan paham ISIS yang cukup pesat di berbagai negara tentu menjadi ancaman tersendiri bagi tiap-tiap Negara yang warganya ikut serta dalam kelompok islam pegaris keras ini dalam berjuang menegakkan khilafah atau daulah islamiyah. Dan pada awal tahun 2016 tercatat Ada sekitar 2000 (dua ribu) hingga 4000 (empat ribu) warga negara Rusia yang bertempur di pihak ISIS, sebagian besar warga suku Chechnya dan penduduk dari republik lainnya di Kaukasus Utara. kata Vladimir Akhmedov. “Seiring dengan kekalahan-kekalahan militer mereka di Suriah dan Irak, kemungkinan para milisi akan kembali ke Rusia dan melancarkan aksi terorisme”

Pada dasarnya Muslim di Rusia memahami tindakan Pemerintahan dalam memerangi terorisme di Suriah, Namun kenyataan pahitnya yang harus disadari bahwa Sebagian besar pejuang oposisi Suriah adalah Muslim Sunni,

seperti kebanyakan Muslim yang tinggal di Rusia. Sementara itu, pasukan yang didukung oleh Moskow terdiri dari kelompok muslim Alawi, yang mendominasi tentara Suriah atau Syiah. Dengan kenyataan pahit ini dan dengan luar biasanya Propaganda yang dilakukan ISIS dalam menyerukan Jihadnya untuk menegakkan Daulah islamiyah yang membuat sekitar 4000 muslim Rusia yang akhirnya memutuskan untuk ikut berjihad dengan kelompok ISIS di Suriah. Hal ini dikarenakan prinsip bahwa Semua Muslim adalah satu komunitas, satu tubuh, satu tubuh itulah mengapa sebagian muslim di Rusia tidak bisa menerima keputusan Rusia. Mereka menganggap Rusia telah membunuh saudara-saudara mereka yang seiman di Suriah, tentu ini tidak bisa dibiarkan bagi mereka.

Mengingat bahwa muslim di Rusia merupakan agama kedua yang terbesar penduduknya di Rusia, jika paham ISIS semakin meluas dan sampai ke Negara ini, maka Rusia akan mengalami gejolak dalam beragama. Isu agama sangat sensitif di setiap Negara karena menyangkut soal keyakinan setiap orangnya. komunitas muslim di Rusia memiliki kekhawatiran, peperangan melawan ekstremis di Suriah yang melibatkan Rusia yang bertindak melawan Sunni di sisi Syiah. Akan mengakibatkan kebencian antaragama. yaitu menyebarnya konflik ke wilayah Rusia dan meningkatnya ancaman serangan teroris di Rusia.

Pada 31 juli 2016, ISIS kembali mempublikasikan sebuah video ancaman di YouTube, Tampak seorang pria yang mengenakan penutup wajah, berkata dengan mata tertuju pada kamera, “Putin, Anda dengar? Kami juga akan datang ke Rusia dan akan membunuh Anda di sana, insya Allah.” Ia lalu menyerukan agar para milisi Islam melancarkan jihad di Rusia. Menurut laporan Reuters, tautan video tersebut dikirim oleh akun aplikasi Telegram yang terhubung

dengan para milisi. Dan Pada bulan sebelumnya Sebelumnya, tepatnya pada Maret 2016 sekelompok teroris Rusia yang berjanji setia kepada ISIS menyerukan jutaan warga muslim Rusia untuk mengangkat senjata dan melakukan serangan terhadap penduduk dan pemerintah Rusia lewat video yang disebar di Dunia maya.

Dengan banyaknya konflik yang terjadi di Suriah membuat banyak Negara yang ingin melakukan Intervensi untuk menyelesaikan masalah yang ada di Suriah, salah satunya Amerika Serikat yang ingin turun tangan dalam menyelesaikan konflik di Suriah, namun berbeda dengan Rusia, Amerika menginginkan adanya Demokrasi di Suriah dan ingin menurunkan Rezim Bashar Al-assad yang diktator, Rezim Bashar harus berakhir agar Konflik di Suriah bisa berakhir.

Konflik di Suriah merupakan fenomena dari Arab Spring, dimana konflik ini sudah terjadi di beberapa Negara sebelumnya di Timur Tengah, Demokrasi merupakan salah satu tujuan dari arab spring, karena sebagian besar negara Timur Tengah menganut sistem monarki, sehingga pemilihan pemimpin dilihat dari garis keturunan, bukan dengan pemilu. Dengan mengatas namakan demokratisasi inilah yang membuat Amerika Serikat dan negara Barat lainnya untuk melakukan intervensi, terbukti dalam pengaruh mereka dalam konflik-konflik yang terjadi sebelumnya dalam menyelipkan tujuannya untuk mendemokraskan sistem di Negara tersebut, karena Amerika Serikat merupakan negara dengan demokrasi tertua didunia.

Julukan super power membuat Amerika Serikat untuk selalu dapat mengintervensi konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain alasan mengkampanyekan demokrasi seperti kebijakan luar negeri yang dimilikinya,



pun Timur Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang sumber daya alam yang dimilikinya. Hegemoni Amerika yang sudah terbentuk juga membuatnya memiliki akses yang lebih mudah untuk masuk menjalankan politiknya di Timur Tengah. Amerika selalu memiliki alasan untuk melakukan invasi militer ke Timur Tengah, yang terjadi pada tahun 2013-sekarang adalah dengan alasan memerangi teroris yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS.

Konflik yang berkejolak sejak awal tahun 2011 ini semakin hari semakin memanas, dan mengundang perhatian dunia. negara-negara yang memiliki militer yang kuat satu persatu mulai melakukan intervensi pada konflik yang terjadi di Suriah, namun negara yang memiliki posisi penting dalam intervensi ini adalah Rusia dan Amerika Serikat, Amerika terus melakukan upaya untuk mendominasi dalam menyelesaikan Konflik di Timur Tengah. keinginan Amerika Serikat menurunkan Bashar al-Assad dan melahirkan kembali negara Suriah dengan sistem yang baru yakni demokrasi. Namun Rusia juga tidak berhenti dalam memberikan dukungannya untuk pemerintahan Bashar al-assad, seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan.

#### **D. Dukungan Pemerintahan Rusia terhadap Pemerintahan Bashar Al-Assad**

Pada konflik yang terjadi di Suriah, PBB (*perserikatan Bangsa-bangsa*) yang Memiliki tugas sebagai polisis dunia yang mengharuskan Dewan Keamanan PBB harus sigap dalam mengambil dan memutuskan kebijakan dalam menyelesaikan konflik atau segala sesuatu yang dapan mengancam keamanan dunia. Pada 2011 pasca terjadinya Konflik di Suriah, PBB berencana menurunkan tim khusus ke Suriah dalam rangka mendukung implementasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB dan menjamin adanya gencatan senjata antara

rezim pemerintahan dan oposisi. Namun, dalam proses menuju pemberlakuan resolusi ini ditemukan banyak hambatan, sehingga resolusi ini tidak dapat diimplementasikan untuk menghentikan konflik yang terjadi di Suriah. Hal ini dikarenakan oleh syarat diberlakukannya sebuah resolusi dari Dewan Keamanan PBB adalah dengan memperoleh kesepakatan sekurang-kurangnya sembilan anggota tidak tetap dan harus disepakati oleh seluruh anggota tetap (Cina, Inggris, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat). Hal ini tertera dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat 3. Kemudian dalam konflik Suriah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, ditemukan kasus dimana Rusia dan Cina mengeluarkan hak vetonya, sehingga berdampak pada penyelesaian konflik Suriah yang terhambat karena dibatalkannya resolusi tersebut. (Kantor Berita Rakyat, 2012)

Semakin pekatnya masalah yang terjadi di Suriah membuat Negara-negara menempuh cara strategis, Barat dan Amerika melakukan berbagai cara yang dilakukan dengan alasan meredam konflik tersebut. Seperti sanksi yang diberlakukan untuk Suriah, yakni berupa embargo senjata, sanksi politik, ekonomi dan lainnya. Saat negara barat mengancam akan memberikan sanksi, maka Rusia tak berhenti untuk memberikan bantuan kepada Suriah.

Pada tahun 2011 ini Rusia memberikan dukungannya kepada pihak pemerintah Bassar al-Assad. Rusia sebagai negara yang memiliki hak veto menjatuhkan hak nya di dewan keamanan PBB untuk menolak draft resolusi yang berisi rancangan intervensi militer ke wilayah Suriah. Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi dengan nomor S/2011/612, diajukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengancam Pemerintah Suriah yang melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang menentang rezim Bashar Al Assad. Resolusi ini dirancang oleh Prancis bersama

Inggris, Jerman, dan Portugal, hal ini juga mendapat dukungan dari sembilan anggota tidak tetap Dewan Keamanan, namun pada akhirnya resolusi ini gagal karena dua negara yang memiliki hak veto, yakni Rusia dan Tiongkok mengeluarkan hak vetonya untuk menentang resolusi tersebut. (RBTH Indonesia, 2015)

Rusia mengeluarkan hak veto nya sebanyak 3 kali, Veto pertama pada tanggal 4 oktober 2011, yang kedua 4 oktober 2012 dan yang ketiga 19 juli 2012, rancangan draft resolusi DK PBB ini menyatakan keprihatinan nya pada kasus yang terjadi di Suriah yang telah memakan banyak korban, PBB sebagai dewan keamanan internasional berusaha dalam mengatasi konflik yang terjadi di Suriah, namun Rusia selalu mengeluarkan hak Vetonya sehingga resolusi tersebut tidak bisa berjalan di Suriah. Veto Rusia terhadap DK PBB tersebut menjadi pelindung bagi Suriah dari usaha intervensi dari luar, Veto ini memberi jaminan hukum kepada Suriah, sehingga semua usaha intervensi dari luar ke Suriah illegal secara hukum.

Rusia terus berdiri menentang. Kasus veto Rusia terhadap rancangan resolusi Arab-Barat yang diajukan di forum Dewan Keamanan PBB menjadi isu utama yang terus diperbincangkan di berbagai forum di dunia Arab. Ada yang mendukung, tetapi lebih banyak yang mengkritik penggunaan hak veto itu. Tindakan Rusia menggunakan hak veto tersebut dilihat sebagai bentuk dukungan tanpa batas terhadap Suriah, khususnya selama berkobarnya aksi unjuk rasa anti rezim Presiden Bashar al Assad. Rusia juga terus menyuplai senjata ke Suriah. Setelah gagalnya resolusi tersebut Wakil Menteri Pertahan Rusia Anatoly Antovov mengatakan Rusia tidak akan menghentikan pengiriman senjata ke Suriah meskipun Kecaman yang datang dari Amerika dan sekutunya terus

berdatangan. dengan veto tersebut Rusia tidak dianggap melanggar peraturan internasional meskipun tetap melakukan ekspor senjata ke Suriah. (Internasional Kompas, 2011)

Pada 29 November 2011 Di Pelabuhan Tartus, dimana pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama yang digunakan oleh Rusia sebagai basis bersandarnya kapal-kapal perang Rusia. Kapal perang lain yang ditempatkan Rusia adalah kapal pengangkut marinir. Kapal-kapal tersebut akan memudahkan pemindahan personal marinir Suriah ke beberapa titik tempat yang menjadi pusat perlawanan oleh pihak pemberontak dan islam pegaris keras. Kapal lain yang juga dikirim oleh Rusia dalam konflik ini adalah jenis kapal penghancur. Kapal ini beroperasi untuk menghancurkan pangkalan militer pemberontak. Kapal ini bertugas untuk menghancurkan sistem persenjataan pemberontak yang digunakan untuk menyerang pemerintah Suriah. Pemerintah Rusia juga mengirimkan sejumlah pasukan militer ke negara tersebut. Pemerintah Rusia mengirimkan sekitar 90.000 pasukan militer darat yang ditempatkan di beberapa titik di wilayah Suriah. Pasukan ini ditempatkan untuk membantu militer Suriah mengatasi serangan pemberontakan dan warga suriah yang kontra terhadap pemerintah Bashar. Pasukan militer Rusia akan melakukan kerjasama dengan militer Suriah, mereka melakukan penjagaan dan patroli militer untuk menanggulangi aksi anarkis yang dilakukan oleh pemberontak dan para pendukungnya. Selain melakukan patroli keberadaan pasukan militer Rusia juga membantu Suriah dengan melakukan pelatihan militer bersama. Pasukan militer Rusia memberikan pengajaran mengenai penggunaan sistem persenjataan yang dikirim Rusia ke negara tersebut. Pelatihan ini dilakukan oleh Rusia karena

keterbelakangan militer Rusia mengenai sistem persenjataan internasional. Selain pengiriman pasukan angkatan darat. (Noor, 2014)

Pada tanggal 30 September 2015 yang lalu, Rusia memutuskan untuk melakukan penyerangan udara terhadap ISIS dan kelompok-kelompok perlawanan yang lain di wilayah Suriah. Rusia melancarkan operasi militer terhadap kelompok teroris ISIS, Awalnya, kelompok udara Rusia terdiri dari sekitar 50 pesawat tempur dan helikopter, termasuk di antaranya adalah pesawat tempur Su-34 dan Su24M, pesawat penyerang Su-25, jet tempur Su-30SM, serta helikopter Mi-8 dan Mi-24. Kemudian, 12 pesawat pengebom dan jet tempur lainnya dikerahkan dan turut bergabung dengan kelompok tersebut. Kini, pasukan udara Rusia di Suriah memiliki 69 unit pesawat tempur. sejak 17 September lalu, Rusia mengirim 500 personal militernya dan memasok berbagai jenis senjata ke Suriah. Penyerangan ini dilakukan setelah Bashar Asad meminta Rusia untuk ikut membantu pasukan Suriah melawan gempuran dari kelompok perlawanan Suriah. dimana ISIS dapat mengancam perdamaian dunia, serta rusia mendapat permintaan sah dari suriah untuk membantu melawan ISIS. (rusia membantu suriah, 2015).

Ketika militer Rusia mulai melakukan intervensi di Suriah, situasi di garis depan menuntut penyediaan secara cepat dukungan militer untuk mengimbangi keunggulan jumlah para pemberontak dan ISIS. Rusia dengan cepat memasok Tentara Suriah dengan tank T-90 dan peluncur roket self-propelled TOS-1A yang sangat efektif untuk menggempur musuh. Namun, untuk memungkinkan tentara Suriah bisa meneruskan serangan ofensif, baik peralatan dan personil harus diisi dan dilatih ulang. (Jejaktapak.com, 2016)

Rusia tak gentar dalam memberikan dukungannya kepada Pemerintahan Bashar Al-Assad, meskipun banyak kecaman dari pihak internasional atas dukungan Rusia di Suriah ini, pada tahun 2016. Terkait aktivitas Rusia di Suriah, bahkan sejak tahun 2015 sudah sekitar 25 ribu tentara Rusia yang dikirim ke Suriah, Konashenkov selaku Juru Bicara kementerian pertahanan Rusia menuturkan :

“para penasihat militer Rusia ikut serta dalam mempersiapkan operasi-operasi militer seperti pembebasan kota Palmyra dan kota-kota lain yang diduduki kelompok teroris ISIS”. (parstoday.com, 2016)

Juru bicara kementerian Rusia juga menambahkan, para penasihat militer Rusia memberikan keterampilan yang diperlukan kepada para pakar Suriah terkait penggunaan senjata yang diberikan Rusia dalam kerangka kerja sama bilateral. Kemudian Juru bicara kementerian pertahanan Rusia menegaskan kembali bahwa "Sudah semestinya kami berpartisipasi dalam mengatur dan merancang operasi-operasi militer semacam ini,". (parstoday.com, 2016)

Juru bicara Kementerian pertahanan Rusia mengabarkan berlanjutnya operasi jet-jet tempur dan helikopter modern negara itu untuk menumpas para teroris di Suriah. Menurutnya, para pakar Rusia di Suriah ikut serta dalam operasi pembersihan bahan peledak dan ranjau darat di kota Palmyra.

Bantuan yang diberikan pemerintah Rusia ke Suriah bukan hanya berbentuk bantuan dalam militer namun ada juga bantuan kemanusiaan yang berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari bagi para korban di Suriah. Rusia mengirimkan lebih dari enam metrik ton bantuan kemanusiaan ke Provinsi Aleppo, Latakia, dan Hama. Hal ini yang dikatakan Kementerian Pertahanan

Rusia dalam sebuah buletin harian yang dipublikasikan pada situsnya. (parstoday.com, 2016)

kiriman makanan siap saji dan barang-barang kebutuhan pokok dari rakyat Rusia masih terus disalurkan kepada para warga sipil yang melarikan diri dari kota Aleppo yang terkepung. kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan telah berjalan. Penduduk di Masyaf (Provinsi Hama) telah menerima sebanyak dua ton bantuan kemanusiaan, di Marj Shali (Provinsi Latakia) sekitar satu ton, di daerah al-Khalidiyah, kota Aleppo (sekolah Haliya Farhad, sekolah Zekwa Hazel) sekitar tiga ton. Kiriman makanan siap saji dan barang-barang kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada para warga sipil yang melarikan diri dari Aleppo yang kini berada di bawah kendali kelompok bersenjata.

Namun tetap saja Tindakan yang dilakukan Rusia untuk membantu Pemerintahan Bashar Al-Assad ini mendapat banyak kecaman dari banyak pihak, salah satunya dari Amerika Serikat, dimana campur tangannya Rusia dalam konflik yang terjadi di Suriah ini di anggap semakin memperburuk suasana konflik yang ada di Suriah, dengan adanya bantuan Militer dari Rusia membuat semakin banyaknya korban yang berjatuhan di Suriah.